

DPR Dorong Posisi Polri di Bawah Presiden



Polri harus mengganti pendekatan represif menjadi pendekatan persuasif dalam menghadapi masyarakat.

“Polri harus menempatkan diri sebagai polisi rakyat,” ujar Ketua Komisi I DPR-RI Yasril A. Baharuddin menanggapi bagaimana Polri menempatkan diri dalam mengantisipasi perubahan struktural di lingkungan Polri, khususnya setelah tahun 2001.

Budaya kekerasan, sikap arogan, dan tindakan-tindakan tak terpuji yang secara kasat mata terlihat dari perilaku oknum polisi di jalan raya harus diubah ke citra yang lebih baik. Demikian juga kesan atau persepsi masyarakat yang enggan berhubungan dengan polisi karena “warga yang kehilangan ayam, lantas lapor ke polisi jadinya kehilangan kambing” perlu dihilangkan secara

nyata di kantor polisi, seperti di Polsek, Polres hingga ke Polda. “Jadi semuanya tergantung apakah Polri mampu melakukan perubahan secara signifikan atau hanya sekadar di permukaan,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Berikut wawancara *Rastra* dengan Yasril A. Baharuddin yang alumni Fisip Universitas Indonesia

jurusan hubungan internasional di ruang kerjanya pekan lalu:

Bagaimana pengamatan DPR, khususnya Komisi I terhadap kinerja Polri?

DPR sebagai wakil rakyat tentu saja meneruskan dan menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Di era reformasi ini, Polri mendapat sorotan yang sangat serius dari masyarakat. Hal itu bukan berarti masyarakat ingin memojokkan Polri, namun merupakan wujud nyata perhatian terhadap Polri sebagai aparat keamanan yang seharusnya mengayomi mereka.

Secara umum warga merasa kecewa atas pelayanan Polri. Mengapa demikian? Katakanlah untuk soal lalu-lintas, di masyarakat terkenal dengan istilah priiit jigo. Memang tidak semua Polantas berbuat seperti itu, tetapi karena memang polisi langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung dinilai tindak-tanduknya. Demikian juga misalnya ada warga yang kehilangan harta benda. Secara umum berkembang persepsi bahwa orang yang kehilangan kambing akan jadi kehilangan kerbau kalau lapor ke polisi. Ini *kan* citra yang tidak baik, ditambah lagi adanya oknum Polri yang melakukan tindakan kekerasan membuat citra Polri makin buruk di mata masyarakat.

Kalau begitu apa yang harus dilakukan Polri agar dicintai masyarakat?

Polri harus mengganti pendekatan represif menjadi pendekatan persuasif dalam menghadapi masyarakat. Selama ini *kan* terasa kental pendekatan militer atau operasi tempur. Padahal tidak seharusnya demikian, karena polisi di dunia internasional tugasnya sebagai aparat keamanan

yang memberikan keamanan dan pengayoman kepada masyarakatnya.

Setelah Polri pisah dari ABRI, 1 April 1999, dalam beberapa bulan ini apakah Anda melihat ada perubahan secara signifikan?

Perubahan secara signifikan belum ada saya lihat di tubuh Polri. Merubah sikap dan mental anggota Polri dalam waktu satu tahun memang tidak semudah yang kita bayangkan. Masalah ini terkait mulai dari proses rekrutmen, sistem pendidikan dan lain sebagainya. Agar sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, pendidikan polisi harus ditekankan pada masalah-masalah HAM, sosiologi, hukum sehingga dalam menangani tugas-tugas kepolisian sebelumnya mendapat bekal yang memadai.

Dalam pertemuan dengan pimpinan Polri, hal-hal apa saja yang ditekankan Komisi I DPR agar mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti Polri?

Kita menekankan agar Polri

mampu merubah sikap dan mentalnya ke arah seperti yang kita inginkan untuk menjadi pengayom dan tidak ditakuti masyarakat. Sekarang ini menurut saya belum sepenuhnya Polri mencitrakan diri sebagai pengayom masyarakat. Sampai tahun 2001, Polri masih berada di bawah naungan Departemen Pertahanan. Setelah itu kita harapkan agar Polri bisa berdiri sendiri menjadi suatu badan sendiri yang nanti langsung bertanggung jawab kepada presiden. Penempatan posisi Polri ini sepanjang yang saya tahu sejalan dengan pemikiran rekan-rekan dari Departemen Pertahanan, dan khususnya pemikiran dari Polri itu sendiri.

Bagaimana dengan Rancangan Undang-undang Kepolisian yang baru, apakah drafnya sudah masuk ke DPR?

Draf RUU untuk menggantikan UU No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum disampaikan ke kita. Kini Undang-undang mengenai pertahan-



belum disampaikan, DPR sendiri kira-kira sudah punya gambaran ke depan, dengan UU yang akan digodok nanti mau diapakan dan mau dikemakanan Polri nantinya?

Tujuan utamanya bagaimana Polri bisa menciptakan rasa aman di masyarakat. Untuk itu perlu dipelajari sosiologis lingkungan, perlu dipelajari psikologis masyarakat.

Bagaimana dukungan DPR terhadap Polri, apakah memang serius atau sekadar basa-basi mewujudkan Polri yang mandiri?

Kita di DPR, bukan hanya dari Komisi I mendukung ke arah itu termasuk anggarannya. Dalam pembahasan anggaran, Kita mendukung anggaran Polri agar lembaga ini bisa merekrut anggota lebih banyak dari pada sekarang, sehingga jumlah polisi nanti proporsional bila dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kalau sekarang perbandingan antara anggota polisi dengan rakyat Indonesia 1 : 1.500, maka perlu diupayakan menjadi 1 : 700.

Ruang gerak polisi dalam menangani kasus-kasus politis dan kasus yang melibatkan orang tertentu sering dikeluhkan ada intervensi, bagaimana ke depan Anda lihat kemandirian Polri?

Situasi yang Anda sampaikan itu mungkin masih ada sampai tahun 2001. Namun dengan adanya UU yang baru situasi semacam itu kita harapkan tidak ada lagi. Di sini Polri



Polisi di dunia internasional tugasnya sebagai aparat keamanan yang memberikan keamanan dan pengayoman kepada masyarakatnya.

an negara (Hankamneg) sedang digodok oleh Departemen Pertahanan. RUU tersebut diharapkan dapat menggantikan UU No 20 tahun 1982, sehingga nantinya ada penajaman peran dan fungsi Polri dan TNI itu sendiri.

Sekalipun draf RUU tentang Polri

ke depan harus berubah sikap mental, demikian juga doktrinnya. Polri juga harus merubah visi dan misinya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat di era globalisasi, di mana HAM sangat menonjol.

Ada usulan yang mengatakan pemilihan Kapolri perlu dikonsultasikan dengan DPR. Menurut Anda bagaimana?

Dalam waktu dekat, mekanisme pemilihan Kapolri saya kira tidak perlu seperti itu karena selama masih ada di Departemen Pertahanan, maka yang menentukan adalah Departemen Pertahanan. Kalau untuk ke depan, kita *kan* mengharapkan badan itu langsung di bawah presiden. Karena di bawah presiden tentu menjadi hak prerogatif presiden. Hanya saja

sebelum diputuskan siapa yang dipilih jadi Kapolri, presiden sebaiknya minta pertimbangan ke DPR. Kenapa perlu demikian, tak lain karena tugas-tugas Kapolri bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Salah satu yang menjadi pertanyaan penting dan relevan hingga kini adalah tentang posisi Polri nantinya di mana. Untuk posisi Polri ini, bagaimana pemikiran DPR?

Saya kira DPR akan mengarahkan dan mendorong, baik dalam pembahasan RUU nanti sehingga posisi Polri berada langsung di bawah presiden.

Apakah ini hanya pemikiran Anda



pribadi atau sudah menjadi komitmen DPR?

Polri langsung di bawah Presiden setelah tahun 2001 saya kira bukan hanya pemikiran saya, tetapi juga teman-teman. Secara struktural Polri perlu langsung di bawah presiden melihat kenyataan selama ini banyaknya intervensi dari pihak luar sehingga membuat polisi tak profesional dalam melakukan tugasnya untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Kalau statusnya langsung di bawah presiden, setelah itu apa yang Anda harapkan?

Kita mengharapkan Polri memperbaiki kinerjanya. Polri tidak ada alasan lagi mengatakan tidak siap. Sebagai anggota dewan kita mengharapkan Polri akan tampil seperti orang bijak, yang mampu menjadi pengayom, dan melindungi masyarakat dari berbagai gejolak. Jika misalnya ada kerusuhan, polisi harus bertindak cepat. Polisi harus bisa sebagai *public service*.

Masalah anggaran menjadi persoalan klasik. Bagaimana Anda melihat aspek ini menunjang kinerja Polri?

Kalau sudah badan sendiri *kan* punya anggaran sendiri. Dan seperti saya bilang tadi dalam pembahasan anggaran masalah ini dibahas sehingga Polri benar-benar profesional dan tentu dengan jumlah yang proporsional.

Kedepan, bagaimana Anda melihat intervensi dari luar terhadap tugas-tugas polisi

Ke depan soal intervensi tak ada lagi karena Polri nantinya langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Kalau misalnya melenceng dari tugas pokok Polri, bagaimana?

Nanti sudah tidak ada dan tak boleh lagi. Kalau ada anggota Polri, termasuk TNI yang bergerak di luar strukturnya harus di tindak tegas dan tidak ada kompromi lagi. Katakanlah ada di antara mereka yang menjadi beking judi atau bandar narkoba, meski dia berpangkat jenderal ya harus ditindak sesuai dengan asas sama di depan hukum. ■

Otonomi Polri Harus Diperjuangkan

Permadi SH, Anggota Komisi I DPR

Akan Kita Bicarakan Dulu dengan Kapolri

Polisi mandiri sudah menjadi tuntutan kita semua. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya saja yang perlu dipertanyakan: Ketika kemandirian itu sudah diberikan, apakah tidak akan ada lagi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukannya oleh polisi? Ini perlu diantisipasi dari sekarang, sehingga tidak menjadi kekhawatiran di masa mendatang.

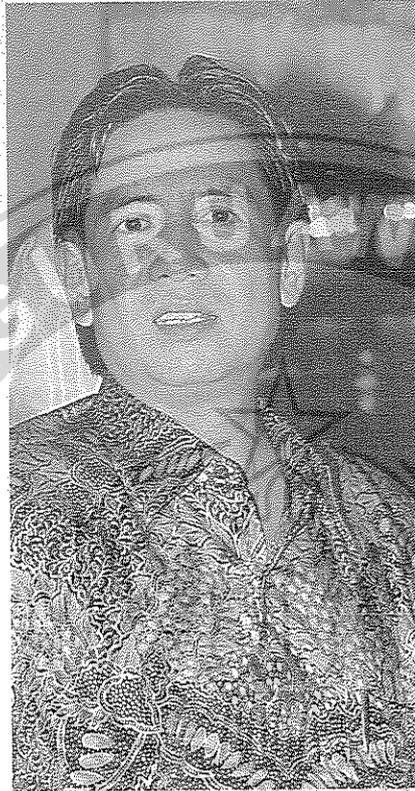
Saya tidak anti pada polisi, hanya kejadian-kejadian yang sering terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa anggota polisi sering melakukan penyimpangan-penyimpangan. Contoh kecil saja, kasat mata sering terjadi pungli di jalan raya. Saya juga pernah mengalami, ketika berurusan dengan kepolisian beberapa tahun lalu seiring dengan aktivitas politik saja. Seharusnya polisi sebagai penegak hukum, benar-benar menjalankan tugasnya, bukan untuk kepentingan tertentu. Sayangnya ketika itu, keberadaan polisi dijadikan alat kekuasaan.

Untuk ke depan, saya mengharapkan Polri benar-benar mandiri karena tugasnya berbeda dengan TNI. Kalau sekarang Polri di bawah Departemen Pertahanan, sifatnya hanya sementara. Kami di badan legislatif, mengusulkan supaya UU Kepolisian dan UU Hankamneg segera ditinjau, diprioritas pembahasannya dalam satu tahun ini. Komisi I DPR-RI akan membicarakan masalah ini lebih lanjut dengan Menteri Pertahanan dan Kapolri.

SYS NS, ANGGOTA MPR RI

Otonomi Polri Harus Diperjuangkan

Mestinya dari dulu Polri harus mandiri, harus menjadi lembaga yang otonom dan tidak di bawah de-



SYS NS

partemen lain.

Menurut saya kesalahan yang dilakukan pada masa lampau, harus menjadi pelajaran yang berharga, karena itu Polri jangan lagi mau dijadikan alat kekuasaan. Polri harus punya wibawa, kalau tidak dilecehkan terus oleh anggota masyarakat.

Untuk membangun citra, Polri harus kerja keras. Di sisi lain untuk meningkatkan kinerja Polri, kesejahteraan anggota harus ditingkatkan. Dengan begitu, dia bisa bekerja secara profesional.

Tentang status Polri ke depan, saya setuju bila langsung di bawah presiden. Memang harusnya begitu. Kalau masih di bawah salah satu departemen, saya khawatir nantinya masuk lagi kepentingan-kepentingan, seperti yang selama ini terjadi.

Sebagai anggota MPR kami punya komitmen sama, untuk memperjuangkan agar Polri benar-benar

mandiri, sejajar dengan Kejaksaan dan Kehakiman. Memang harus diperjuangkan terus, karena kalau kita diam, statusnya akan jadi *ngambang*, *nggak* ada kejelasan.

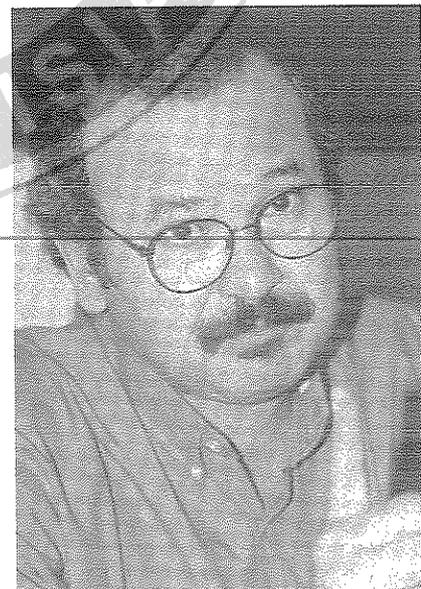
GHAZALI ABBAS ADAN,
ANGGOTA MPR RI

Mengapa Harus Menunggu Sampai 2001

Yang namanya polisi di manapun di dunia harus berdiri sendiri, bukan di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan seperti yang ada di Indonesia. Polisi harus kembali pada jati diri dan habitatnya, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakatnya.

Menurut Menteri Pertahanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono kemandirian Polri baru bisa terealisasi tahun 2001. Saya pikir *nggak* perlu terlalu lama. Kalau segala macam perangkatnya sudah siap, kenapa *nggak* secepatnya. Yang jadi soal, pemerintah punya kemauan apa *nggak*.

Polri di mata saya, masih sering pakai cara-cara militer. Kenapa?



Ghazali Abbas Adan

Karena mereka masih di bawah kendali militer, terkooptasi militer. Dampaknya, mau tidak mau mereka harus ikut *policy* militer. Seharusnya tidak begitu, polisi harus berani melawan perintah yang tidak sesuai dengan karakter polisi.

Soal penanganan kasus, katakanlah pemberantasan Narkoba, menurut saya tidak akan tuntas, akan mentok karena 'saudara tua'-nya banyak terlibat. Kalau ketemu 'saudara tua', polisi biasanya mundur. Begitu. Seharusnya *nggak* boleh begitu, polisi harus profesional. Bertugas sesuai dengan koridor, *kan* sudah digariskan. Sayangnya polisi masih sungkan kepada 'saudara tua'-nya.

Jujur saja, banyak anggota yang bermain dan melakukan penyimpangan. Katakanlah soal judi, banyak uang yang disita petugas di arena judi, namun pertanggungjawaban tak jelas. Berarti ada apa-apanya. Anggota yang bermental tidak profesional seperti itu harus ditindak.

Sinyallemen permainan hukum di lingkungan Polri harus diusut, sanksinya harus berat bagi mereka yang terbukti. Pimpinan Polri harus punya sikap tegas terhadap anggotanya yang telah melakukan kesalahan. Kalau itu dibiarkan, akan menjadi preseden buruk, karena *nggak* ada sanksinya.

Agar dicintai masyarakat, maka sikap dan perilaku Polri ke depan harus diubah. Dan ini akan sangat tergantung pada pimpinan Polri. Pimpinan Polri ke depan haruslah merupakan figur yang mampu mengayomi dan melindungi rakyat, bukan figur yang menyelidiki pakai bedil, bukan yang bermental pembunuh. Di samping itu, calon pimpinan Polri di berbagai tingkatan di masa depan, harus bersih dari KKN, berani menegakkan kebenaran, dan tentu saja moralnya bagus. Berani melawan kebatilan dari manapun datangnya.

Figur yang memenuhi kriteria itu, saya kira masih banyak di lingkungan Polri. Mereka bisa jadi sengaja digencet atau tak mau ditampilkan di depan. Coba ditampilkan, polisi-polisi yang bagus, polisi yang punya *track record* yang bagus. Banyak *kok* polisi-polisi kita yang bagus. Sudah waktunya mereka ini mendapat promosi untuk mewujudkan harapan

masyarakat akan hadirnya polisi rakyat.

Harapan saya, kepada polisi muda yang penuh idealisme agar mampu meningkat citra Polri ke depan. Sebagai penerus Polri harus sadar akan fungsinya, yakni sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Mereka harus mempersiapkan diri bahwa mereka adalah polisi yang profesional, bukan amatiran.

Yang saya lihat, sampai sekarang status Polri belum ada kejelasan. Masih mengambang. Belum ada niat yang serius sehingga polisi itu tidak terkooptasi dengan militer. Yang saya lihat, Pak Wiranto belum serta merta bisa meru-



Aisyah Amini

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

bah pola pikir, pola kerja, yang sudah lama terjadi pada Orde Baru. Apalagi saya lihat Presiden Gus Dur masih tergantung dengan Pak Wiranto. Ini bisa kita lihat saat Wiranto dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Padahal, apa *sih* urgensinya, *kok* dia dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Anggota DPR bukan, dia *kan* eksekutif. Berarti Gus Dur masih ada ketergantungan pada militer. Kalau ada ketergantungan terhadap militer, bisa menyulitkan posisi Polri yang otonom ke depan.

Menurut saya anggota DPR harus cerdas bersuara, sehingga secepatnya Polri lepas dari Departemen Pertahanan, dan statusnya menjadi jelas, tidak gantung seperti sekarang. Tentunya banyak yang harus diperhatikan. Misalnya, soal kesejahteraan harus menjadi prioritas utama. Gaji polisi perlu dinaikkan. Pemerintah punya kewajiban meningkatkan ke-

sejahteraan polisi jika mereka dituntut profesional.

Aisyah Amini, Anggota DPR RI

DPR akan Perjuangkan Polri Mandiri

Kita harus menentukan dan memutuskan di mana posisi Polri ke depan. Apakah statusnya menjadi sebuah lembaga mandiri yang bertanggung jawab pada presiden, atau berada di salah satu departemen. Kalau saya pribadi menilai sebaiknya Polri mandiri. Apalagi nanti kalau otonomi daerah diberlakukan, maka polisi setempat akan sangat terkait dengan pemerintah daerah.

Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menuju Polri yang mandiri, tentunya pembenahan dari segi SDM-nya, peningkatan disiplin, ya kesiapan semuanyalah. Itu kita harapkan diselesaikan secepatnya, sehingga ke-mandiran itu benar-benar terwujud dan dirasakan oleh rakyat.

Polri juga harus merespon keluhan-keluhan masyarakat tentang penyimpangan yang dilakukan oknum polisi, misalnya pungli di jalan raya, dan bentuk kekerasan lainnya. Saya pikir banyak yang harus diatasi secepat mungkin oleh Polri sehingga Polri mandiri tidak menjadi bumerang.

Profesionalisme Polri harus benar-benar ditingkatkan. Misalnya, kasus yang lagi hangat tentang Narkoba harus bisa dituntaskan. Yang cukup merisaukan kita, aparat keamanan disinyalir terlibat dalam peredarannya. Mestinya aparat yang harus memberantas, tapi yang terjadi mereka terlibat di dalamnya. Nah kepolisian harus membersihkan dirinya dan menertibkan angkatan lain yang terlibat sehingga rakyat bisa percaya kepada polisi sebagai penegak hukum.

Khususnya kepada polisi yang masih muda-muda agar menghindari diri dari perbuatan yang negatif, sehingga citra Polri bisa meningkat. Sementara bagi anggota yang melanggar agar ditindak tegas oleh pimpinan Polri sehingga nama baik polisi di tengah-tengah masyarakat meningkat lagi.

Kami dari anggota DPR terus berjuang agar Polri benar-benar mandiri, sehingga ke depan tidak lagi terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. ■

Plus- Minus Peradilan Pelanggaran HAM

Dengan terkuaknya keterbukaan, maka dosa-dosa politik masa lalu kembali diungkit dan ditarik ke permukaan. Kelompok masyarakat, terutama lembaga swadaya masyarakat yang menggeluti persoalan hak asasi manusia (HAM) secara nyaring meneriakan atas pelanggaran HAM di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Timtim,

Aceh dan Irian Jaya. Dan tentu karena kasus ini melibatkan petinggi negeri, khususnya dari kalangan TNI dan Polri. Bahkan baru-baru ini sejumlah mantan jenderal diundang dalam Pansus di DPR. Dalam kasus pelanggaran HAM di Timtim misalnya, sejumlah nama terbawa-bawa termasuk pejabat dari lingkungan Polri. Dalam perkembang-

an, banyak pihak mengusulkan bentuk pengadilan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM itu. Ada yang usulkan pengadilan HAM, pengadilan militer, bahkan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing pengadilan itu, berikut kami sarikan dari Kompas edisi 26 November 1999.

PERADILAN UMUM (SIPIL)

Kelebihan:

- Lebih terbuka dibanding pengadilan militer.
- Lebih mudah dikontrol daripada pengadilan militer.
- Prasarana jaksa, hakim, telah tersedia.

Kelemahan:

- * Tidak lazim diberlakukan untuk TNI/Polri.
- * Masih membutuhkan tafsir hukum soal kompetensi pengadilan.
- * Tak ada jaminan fakta dan kebenaran terungkap tuntas.
- * Proses penyelesaian lama.

PERADILAN MILITER

Kelebihan:

- Perangkat hukum dan prasarana telah tersedia.

Kelemahan:

- Tak dipercaya masyarakat karena tak bisa memberikan keadilan.
- Peranan Perwira Penyerah Perkara yang begitu besar untuk menentukan dakwaan.
- Terbuka kemungkinan terjadi distorsi hukum.
- Proses pengadilan lama.

PERADILAN KONEKSITAS

Kelebihan:

- Perangkat hukum dan prasarana telah tersedia.
- Lebih transparan daripada pengadilan militer.

Kelemahan:

- Prasyarat tindak pidana dilakukan bersama-sama sipil dan TNI.
- Tergantung Ketua MA.

PERADILAN HAM

Kelebihan:

- Bisa lebih menjamin rasa keadilan masyarakat.

Kelemahan:

- Perangkat hukum belum tersedia.
- Prasarana, SDM belum tersedia.
- Belum punya pengalaman.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Kelebihan:

- Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sekaligus memberikan kompensasi kepada korban.
- Fakta dan kebenaran bisa lebih terungkap.
- Risiko politik relatif terjaga.

Kekurangan:

- Belum ada hukum yang mengatur.
- Prasarana dan SDM belum tersedia.
- Belum punya pengalaman.